

Meningkatkan Pemahaman Diaspora tentang Wawasan Nusantara sebagai Upaya untuk Menyukkseskan Pemilihan Umum 2019

Arundati Shinta

Alumni Program Pendidikan Angkatan (PPRA) LVIII Lemhannas RI,
Lektor Kepala Fakultas Psikologi Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah membahas tentang keengganan diaspora Indonesia untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Pada Pemilu 2014, hanya sekitar 30% diaspora yang aktif dalam Pemilu. Padahal diaspora itu adalah orang Indonesia yang masih memegang paspor Indonesia secara sah. Mereka juga mempunyai kontribusi nyata dalam pembangunan Indonesia baik secara sosial, ekonomi maupun budaya. Mereka juga cenderung terlibat dalam politik identitas, karena diaspora Indonesia cenderung terbentuk berdasarkan suku, agama, dan profesi. Keengganan berpartisipasi dalam Pemilu tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tentang konsep Wawasan Nusantara masih rendah. Kajian ini membahas tentang hambatan dari diaspora untuk berpartisipasi dalam Pemilu serta saran-saran untuk mengatasinya.

Kata-kata kunci: Diaspora, Pemilu, Wawasan Nusantara.



PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) Indonesia 2019 adalah peristiwa penting, karena pada saat itu seluruh bangsa Indonesia yang peduli dengan keberadaan Indonesia akan memilih presidennya. Selain presiden dan wakil presiden, pada pemilu 2019 tersebut, masyarakat Indonesia juga akan memilih wakil-wakil rakyat yaitu anggota DPR, DPD, DPRD propinsi, dan DPRD kabupaten. Keberadaan Pemilu yang berkualitas menunjukkan bahwa suatu negara telah dikelola secara modern dan demokratis, karena pemimpin tertinggi negara tersebut dan juga para wakil rakyatnya telah dipilih langsung oleh seluruh rakyatnya.

Permasalahan yang relevan dengan Pemilu adalah rendahnya partisipasi masyarakat Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya, khususnya masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri (diaspora). Mereka menjadi golput (golongan putih, tidak bergabung/tidak memilih partai apa pun). Partisipasi mereka dalam pemilu sebelumnya hanya 30% (Suara Merdeka News, 2017). Kemenlu sudah berusaha untuk mengatasi permasalahan

tersebut, namun belum tuntas. Permasalahan selanjutnya, para diaspora enggan mengikuti pemilu karena adanya politik identitas. Hal ini terjadi karena di rantau, mereka hidup berkelompok berdasarkan faktor kesamaan nasib, dan identitas lainnya. Faktor kesamaan tersebut berpengaruh terhadap kesamaan pemilihan pemimpin (Felfe & Schyns, 2010). Artinya, calon pemimpin yang identitasnya tidak sama dengan para diaspora itu tidak akan dipilih.

Tulisan ini berfokus pada diaspora khususnya diaspora Indonesia, karena mereka adalah penduduk marginal yang sering terlupakan/tidak dianggap oleh calon pemimpin peserta Pemilu di Indonesia. Mereka terlupakan karena jumlahnya sedikit dan lokasinya tersebar di seluruh dunia, sehingga sulit dijangkau. Pembahasan ini berpihak pada diaspora, berdasarkan alasan pemenuhan hak untuk memilih (prinsip keadilan sosial), bukan untuk memenangkan seorang calon pemimpin. Partisipasi diaspora ini dalam Pemilu 2019 akan sukseskan Pemilu dan tentu saja akan memperkuat

keberadaan Indonesia.

Tujuan penulisan ini adalah membahas tentang keengganan diaspora Indonesia untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Manfaat kajian ini adalah untuk memberi masukan KPU dan KBRI dalam mendorong para diaspora agar aktif dan nyata dalam membangun Indonesia dengan banyak cara, dan salah satunya yaitu tidak menjadi golput dalam Pemilu serta tidak terlibat dalam politik identitas.

PEMBAHASAN

Sisi Positif Diaspora

Siapa diaspora itu? Diaspora berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti penyebaran atau penaburan (Kemendag, 2017). Penyebaran tersebut berhubungan dengan penduduk, sehingga diaspora berhubungan dengan perantaraan penduduk. Istilah diaspora Indonesia sering dipersepsikan sebagai orang Indonesia yang lama tinggal di luar negeri. Diaspora adalah tercerai-berainya suatu bangsa sehingga mereka tersebar di seluruh dunia, dan bangsa tersebut tidak memiliki negara. Contohnya adalah bangsa Yahudi sebelum berdirinya negara Israel pada tahun 1948 (Setiawan, 2012-2018; Wahlbeck, 2002). Selanjutnya beberapa kajian (Romdiati, 2015) menyebutkan bahwa diaspora adalah emigran dan keturunannya yang tinggal di luar negara tempat leluhurnya namun mereka masih mempertahankan hubungan emosi dengan negara asalnya tersebut. Hubungan emosi tersebut misalnya tercermin dari kebiasaan makan dan bersosialisasi. Pengertian tersebut tentu saja mengakibatkan jumlah diaspora Indonesia menjadi sangat banyak.

Pengertian diaspora Indonesia selanjutnya adalah orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri dan mereka dikelompokkan menjadi empat kategori (Jazuli, 2017; Kemendag, 2017). Kategori pertama adalah WNI yang tinggal di luar

negeri dan masih memegang paspor Indonesia secara sah. Kategori kedua, orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara asing karena proses naturalisasi dan sudah tidak memegang paspor Indonesia lagi. Kategori ketiga adalah warga negara asing yang memiliki leluhur dari Indonesia. Kategori keempat adalah warga negara asing yang tidak mempunyai leluhur dari Indonesia, namun mempunyai perhatian luar biasa terhadap Indonesia. Diaspora keempat ini sering mempublikasikan pendapatnya tentang permasalahan di Indonesia di media massa, dan kemudian ikut berkontribusi dalam pemecahannya.

Dalam kajian ini, pengertian diaspora adalah orang Indonesia yang berada di luar negeri secara suka rela dan masih memegang paspor Indonesia secara sah. Artinya, mereka mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Mereka lama berada di luar negeri, namun masih tetap berhubungan secara emosional dengan masyarakat di Indonesia. Apalagi dengan kemajuan teknologi serta semakin masifnya migrasi internasional, maka hubungan diaspora dengan negara asal menjadi sangat mudah daripada masa lampau (Wahlbeck, 2002). Hal yang menarik adalah justru keengganan mereka untuk berpartisipasi dalam politik atau Pemilu Indonesia. Situasi tersebut bertentangan dengan berbagai penelitian antropologi (dalam Wahlbeck, 2002) tentang diaspora dari Karibia dan Filipina yang tinggal di Amerika Serikat. Para diaspora tersebut sangat terlibat dalam persoalan-perosalan sosial, ekonomi, politik dan budaya baik di negara asalnya maupun di Amerika Serikat.

Bila para diaspora itu tetap menjalin hubungan emosi dengan orang-orang di Indonesia, mengapa mereka tidak aktif dalam Pemilu Indonesia? Ada lima kemungkinan yang menyebabkan para



diaspora enggan memberikan suara pada saat Pemilu. Alasan **pertama**, para diaspora kurang mengetahui rekam jejak calon-calon pemimpin yang terpilih (Primandari, 2014). Kalau pun mereka mengetahui rekam jejak calon pemimpin bangsa, maka yang mereka lihat pertama kali adalah identitas agama, suku, ras dan golongannya bukan prestasinya. Mereka cenderung terkena politik identitas (Felfe & Schyns, 2010). Hal ini karena diaspora Indonesia cenderung terbentuk berdasarkan suku, agama, dan profesi (Romdiati, 2015).

Alasan **kedua**, para diaspora mungkin saja tinggal jauh dari TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang biasanya berada di KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) yaitu di ibu kota negara. Transportasi dari rumah menuju KBRI mungkin tidak tersedia. **Ketiga**, prosedur pemungutan suara dipersepsikan rumit, sehingga para diaspora enggan memberikan suaranya. Mereka harus mendaftar terlebih dahulu, mengurus surat pemanggilan, baru kemudian datang di TPS untuk memberikan suaranya. **Keempat**, faktor pekerjaan membuat para diaspora ini enggan memberikan suaranya. Kegiatan mendatangi TPS dianggap telah merugikan pekerjaannya. Apalagi bila hari pemungutan suara dilakukan pada hari kerja. Perusahaan tempatnya bekerja tidak akan memberi ijin untuk keperluan pergi ke TPS. Hal ini juga terjadi pada 80% TKI di Timur Tengah yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga. Mereka tidak mendapatkan ijin dari majikannya untuk pergi ke TPS. Mereka juga tidak bisa mengirimkan surat, karena alamatnya adalah PO BOX (Primandari, 2014).

Alasan **kelima**, para diaspora mungkin saja merasa tidak perlu untuk memberikan suara dalam Pemilu, karena hidupnya berada di luar Indonesia sehingga semua kebijakan

pemerintah yang terpilih tidak akan berpengaruh langsung terhadap kehidupannya sehari-hari. Hal ini menunjukkan pemahaman diaspora tentang konsep Wawasan Nusantara termasuk rendah, karena dalam konsep tersebut terkandung kewajiban seorang WNI.

Keengganan diaspora untuk berpartisipasi dalam Pemilu, juga bisa dijelaskan melalui teori *push and pull factors* yang banyak digunakan dalam membahas fenomena migrasi. Teori tersebut dikemukakan oleh Everet S. Lee (1966). Berdasarkan teori tersebut, seseorang memutuskan untuk pergi dari suatu daerah/negara ke tempat lain karena empat faktor yaitu daerah asal, daerah tujuan, rintangan antara, dan faktor personal. Pada daerah asal seseorang memandang banyak hal negatif (tidak menguntungkan) dan ia memandang daerah lain dapat mengatasi persoalannya karena mempunyai lebih banyak hal positif (menguntungkan). Ia juga melihat hal-hal negatif (merugikan) (lihat Gambar 1) di daerah asal adalah lebih banyak daripada daerah tujuan. Kelancaran ia berpindah tempat juga dipengaruhi variabel antara, misalnya jarak, kemudahan memperoleh visa serta paspor, keamanan transportasi, kerumitan perjalanan bila individu disertai keluarga, dan sebagainya. Semakin banyak nilai negatif di daerah asal, semakin banyak nilai positif di daerah tujuan dan semakin mudah variabel antara diatasi, maka semakin tinggi arus migrasi menuju negara tujuan.

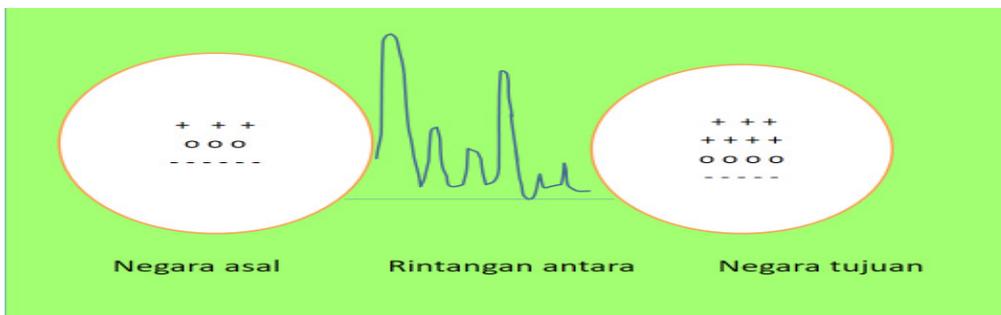
Selain itu, para diaspora itu cenderung pergi dari Indonesia berdasarkan motivasi ingin menambah ilmu (pelajar, mahasiswa), ingin memperbaiki kesejahteraan (pekerja, TKI, atau mengikuti pasangan yang menjadi warga negara tujuan diaspora), dan mungkin alasan politik (diaspora yang terpaksa pergi dari Indonesia). Motivasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai

negara asal, dipersepsikan sebagai negara yang kurang mampu memenuhi keinginannya (mempunyai banyak nilai negatif). Negara tujuan, sebaliknya, dipersepsikan lebih maju daripada Indonesia (lebih banyak nilai positifnya). Di samping itu, para diaspora TKI tersebut pada umumnya adalah pekerja kasar, bernasib buruk baik ketika akan meninggalkan Indonesia, ketika berada di negara tujuan dan ketika kembali lagi ke Indonesia (Faturachman, 2002). Situasi seperti ini cenderung mendorong mereka berpikir ulang untuk memberikan suaranya pada calon pemimpin bangsa.

Selanjutnya faktor personal juga berpengaruh dalam mendorong/menghambat seseorang untuk berpindah. Faktor personal itu misalnya pengetahuan tentang orang-orang yang diharapkan bisa menolong di daerah tujuan. Faktor personal ini penting karena perhitungan orang-orang tentang situasi di daerah tujuan sering kurang tepat bila dibandingkan dengan penilaiannya pada daerah asal. Bahkan Lee (1966) juga menjelaskan bahwa alasan migrasi orang-orang itu sering kurang rasional. Situasi ini menjelaskan bahwa diaspora mungkin saja terkena politik identitas. Situasi ini terjadi yang mana banyak orang desa pindah ke kota, penduduk negara berkembang pindah ke negara yang maju.

Tidak bersemangatnya masyarakat Indonesia di luar negeri untuk berpartisipasi dalam Pemilu Indonesia juga disebabkan oleh pertimbangan *cost-benefit* dari pihak wakil rakyat. Para wakil rakyat cenderung berpikir bahwa para diaspora itu jumlahnya sedikit dan tersebar di seluruh dunia. Bila keberadaan diaspora itu dikunjungi maka biaya yang dibutuhkan akan sangat banyak. Akan lebih menghemat waktu dan uang bagi para calon wakil rakyat itu bila hanya masyarakat domestik saja yang diperhatikan. Situasi ini terjadi pada para calon wakil rakyat DPR dengan daerah pemilihan Jakarta, pada Pemilu 2014 yang lalu (Indoconnect, 2014).

Keengganan para calon pemimpin bangsa untuk berkampanye secara langsung di luar negeri karena alasan *cost-benefit*, telah memunculkan ide untuk kampanye melalui media sosial. Jenis kampanye melalui media sosial ini dianggap jauh lebih murah dan efektif menjangkau calon pemilih. Hal yang merisaukan adalah adanya *hoax* atau propaganda bohong yang terus-menerus disiarkan sehingga orang menjadi percaya. Para diaspora mungkin saja menjadi percaya dengan isi dari berita bohong di media sosial, sehingga mereka terpapar dengan politik identitas. Situasi politik secara makro seolah menjadi persoalan pribadi, sehingga mereka menginginkan identitas yang sama



Gambar 1. Diagram Lee (1966).

seperti yang ada di media sosial tersebut. Inilah yang disebut dengan *personalized politics* (Bennet, 2012). Kegaduhan yang berasal dari dunia maya akan berdampak pada kehidupan di dunia nyata (Juliswara, 2017), karena orang-orang mungkin saja akan melakukan *self-validated* atau mencari sendiri pembenarannya (Bennet, 2012).

Apa keuntungannya membahas peran diaspora dalam Pemilu? Ini adalah pertanyaan kritis, karena jumlah diaspora adalah sangat sedikit daripada jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan, sehingga diaspora itu sering tidak dianggap. Selain itu, data tentang diaspora juga masih simpang siur, sehingga sulit dilacak. Berdasarkan data dari *Department of Economic and Social Affairs United Nations* tahun 2015, jumlah migran Indonesia yang berada di luar negeri mencapai sekitar 3,9 juta jiwa. Sekitar 33,4% diaspora tinggal di Saudi Arabia dan 27,6% di Malaysia. Sebagian besar mereka berstatus sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) (Kemendag, 2017).

Sementara itu literatur yang lain (Muliawan, 2016) menyebutkan bahwa jumlah diaspora Indonesia adalah sekitar 8 juta atau 3% dari seluruh WNI yang berhak memilih. Angka tersebut tentu akan bertambah seiring dengan kemajuan dan kemudahan transportasi. Jumlah diaspora sedikit karena jarang penduduk Indonesia yang mampu bepergian ke luar Indonesia dalam jangka waktu lama. Para diaspora itu berada di 120 negara (Wibisono, Legionosuko & Yuninda, 2017).

Meskipun jumlah diaspora sedikit, namun mereka masih memegang paspor Indonesia sehingga masih berhak menjadi peserta pemilu. Berdasarkan konsepsi Wawasan Nusantara, Indonesia sangat menghargai hak-hak warga negara Indonesia. Konsepsi Wawasan Nusantara tersebut mengandung tiga unsur kebangsaan Indonesia yaitu

rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan (Tim Pokja Geopolitik dan Wawasan Nusantara (2018). Selain itu fenomena diaspora akan semakin banyak jumlahnya, karena informasi ke seluruh dunia semakin terbuka dan juga transportasi akan semakin terjangkau harganya. Ini adalah penanda bagi fenomena globalisasi migran (Romdiati, 2015). Jadi, diaspora yang meskipun sedikit jumlahnya harus tetap dirawat keberadaannya. Wujud dari perawatan itu adalah mengakomodasikan hak memilihnya dalam Pemilu.

Keunggulan para calon pemimpin bangsa untuk berkampanye secara langsung di luar negeri karena alasan cost-benefit, telah memunculkan ide untuk kampanye melalui media sosial. Jenis kampanye melalui media sosial ini dianggap jauh lebih murah dan efektif menjangkau calon pemilih. (Bennet, 2012)

Selain karena prinsip keadilan sosial dan globalisasi, keberadaan diaspora penting untuk diperhatikan terutama dalam hal memfasilitasi hak memilih dalam Pemilu. Hal ini karena sejatinya diaspora itu mempunyai keunggulan yang berguna bagi pembangunan bangsa Indonesia (Romdiati, 2015). Ada lima sisi positif diaspora Indonesia. Pertama, mereka mampu mengirimkan remitansi (transfer ekonomi) yang sangat berguna untuk memperkaya devisa negara. Pada umumnya mereka adalah pekerja migran. Berkaca pada Tiongkok, peran diaspora sangat signifikan

untuk pembangunan nasional. Diaspora menyumbang 50% investasi (Jazuli, 2017).

Sisi positif kedua dari diaspora adalah mereka mampu menjadi duta bangsa Indonesia. Mereka mampu mempromosikan budaya bangsa Indonesia ke seluruh dunia, sehingga banyak wisatawan manca negara yang tertarik berkunjung ke Indonesia. Sisi positif ketiga, mereka mampu memperkaya bangsa Indonesia melalui transfer ketrampilan dan teknologi dari negara yang ditempatinya kepada teman-teman dan keluarganya di Indonesia. Hal ini karena negara yang dituju para migran itu biasanya jauh lebih maju peradapannya daripada Indonesia.

Sisi positif keempat, diaspora Indonesia bisa menjadi duta investasi (Eman, 2017). Duta investasi itu adalah orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri dan mereka akan mengajak investor luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Para diaspora Indonesia ini juga akan menjadi duta promosi produk Indonesia, yaitu untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia. Produk Indonesia itu bisa saja berasal dari perusahaan besar, menengah maupun kecil. Sisi positif kelima, diaspora Indonesia dapat membantu dengan memberi perlindungan bagi sesama diaspora yang rentan mendapatkan kekerasan. Contohnya adalah TKI yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga.

Keberadaan diaspora yang sedikit dan tersebar di seluruh penjuru dunia ini meskipun menguntungkan bila diperhatikan, namun sayangnya mereka sering terpapar oleh politik identitas. Mereka cenderung lebih memilih pemimpin yang sama identitasnya daripada rekam jejak prestasinya (Felfe & Schyns, 2010). Fenomena khusus diaspora Indonesia yang terpapar politik identitas itu harus diperhatikan, karena sangat besar kemungkinannya mereka memperburuk nama Indonesia di mata

internasional. Oleh karena itu, keberadaan diaspora tersebut harus diperhatikan.

Di mana diaspora ini bisa dijumpai? Seperti telah disebutkan di atas, diaspora tersebar di sekitar 120 negara. Mereka sering membentuk berbagai perkumpulan. Perkumpulan itu antara lain: PPI (Persatuan Pelajar Indonesia), berbagai organisasi seperti *Indonesia Integrated di Belgia* (Wibisono et al., 2017), berbagai pertemuan rutin yang digelar oleh KBRI atau masyarakat diaspora Indonesia, dan *Indonesian Diaspora Network* yang digagas oleh Dino Pati Djalal di Los Angeles pada Juli 2012, pada saat berlangsungnya Kongres Diaspora Indonesia pertama (Eman, 2017-2019). Kemudahan menemukan para diaspora Indonesia ini akan juga akan memudahkan proses Pemilu Indonesia pada 2019.

Berdasarkan konsepsi Wawasan Nusantara, Indonesia sangat menghargai hak-hak warga negara Indonesia. Konsepsi Wawasan Nusantara tersebut mengandung tiga unsur kebangsaan Indonesia yaitu rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan

(Tim Pokja Geopolitik dan Wawasan Nusantara (2018))

Usaha-usaha untuk memperkuat Wawasan Nusantara pada diaspora

Keberadaan diaspora ini sangat erat hubungannya dengan konsep wawasan nusantara Indonesia. Wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Cara



pandang tersebut hendaknya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan nusantara ini mempunyai enam fungsi. Pertama, menumbuhkan kesadaran berbangsa. Kedua, menumbuhkan kesadaran berbangsa Indonesia. Ketiga, menanamkan cinta tanah air sehingga bersedia berkorban untuk tanah air. Keempat, menumbuhkan rasa tanggung jawab, hak, dan kewajiban terhadap negara Indonesia. Kelima, mengembangkan kehidupan yang plural. Keenam, mengembangkan masyarakat madani untuk pengembangan kekuasaan Pemerintah Indonesia (Tim Pokja Geopolitik dan Wawasan Nusantara, 2018).

Berdasarkan konsep wawasan nusantara tersebut, para diaspora diharapkan masih peduli dengan keberadaan Indonesia. Hal ini karena mereka masih mempertahankan hubungan emosi dengan leluhurnya di Indonesia. Selain itu, mereka masih memegang paspor Indonesia. Kepedulian itu salah satu perwujudannya adalah aktif berpartisipasi dalam Pemilu. Kemudahan berpartisipasi dalam pemilu bagi diaspora juga menjadi program unggulan dari KBRI. Hal ini sudah dilakukan oleh para diaspora Belgia (Wibisono et al., 2017).

PENUTUP

Kesimpulan

Rendahnya partisipasi diaspora Indonesia dalam pemilu adalah sebuah fenomena yang harus dihadapi dengan kritis. Apalagi, mereka juga terkena politik identitas, yang telah membuatnya semakin harus diwaspadai. Keberadaan diaspora yang terkena politik identitas itu akan menjadi citra buruk Indonesia di mata internasional. Meskipun demikian, keberadaan diaspora tetap harus diakomodasi, karena diaspora memiliki nilai-

nilai yang sangat menguntungkan Indonesia. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh KBRI dan Kementerian Luar Negeri selama ini dalam mengelola para diaspora diharapkan akan membuat mereka menjadi duta Indonesia yang baik. Hal ini karena secara sosiologis dan antropologis, masyarakat diaspora akan mengalami pola perubahan sebagai akibat interaksi dan adaptasi dengan masyarakat lokal. Mereka akan mengalami banyak perubahan antara lain dalam hal kemajemukan agama, identitas, kemasyarakatan, dan praktek-praktek ritual.

Saran

Untuk menyukseskan Pemilu 2019, maka peran diaspora harus dioptimalkan. Untuk itu, politik identitas yang menghinggapi baik para diaspora maupun calon pemimpin nasional perlu dikikis. Oleh karena itu, saran pertama yang dapat dikemukakan yaitu

1. Mengundang calon pemimpin yang menjadi peserta pemilu, terutama yang tidak terindikasi dengan politik identitas. Untuk itu, kerja sama antara KPU, KBRI, dan Kemenlu perlu dibentuk. Calon pemimpin itu diminta untuk memaparkan visi-misinya kepada masyarakat diaspora Indonesia.
2. KBRI dan Kemenlu meminta KPU tentang paparan visi, misi, slogan, dan program kerja calon pemimpin untuk dipublikasikan di media sosial. Publikasi itu hendaknya bebas dari politik identitas. Untuk mengatasi berita-berita bohong (*hoax*) dari calon pemimpin nasional tersebut, maka media sosial resmi dari calon pemimpin tersebut harus didaftarkan. Bila media sosial itu mengandung berita bohong, maka KPU akan memberi penalti.
3. KPU bisa menambah TPS (Tempat Pemungutan Suara), sehingga TPS tidak

- hanya berada di KBRI saja yang biasanya ada di ibu kota negara.
4. Kemenlu dan KBRI harus selalu memutakhirkan data masyarakat Indonesia yang berhak untuk memilih dan menjadi diaspora. Data ini penting untuk KPU. Data yang terkumpul itu juga bisa digunakan oleh KBRI untuk berinteraksi dengan diaspora untuk mendata informasi kependudukan lainnya, serta untuk mengabarkan tentang kemajuan-kemajuan yang telah dicapai Indonesia.
 5. KBRI hendaknya aktif mengadakan pertemuan formal dan informal sebagai ajang untuk saling mengingatkan rasa kebangsaan Indonesia. Konsep yang bisa ditiru adalah adanya pasar Tong-Tong di Den Haag Belanda. Pasar Tong-tong adalah festival tahunan terbesar di Eropa untuk mempromosikan budaya dan produk Indonesia. KBRI juga bisa mengundang mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di negara asing untuk mengadakan seminar. Dalam forum resmi tersebut bisa diundang figur-figur yang toleran, untuk mengikis politik identitas.
 6. KBRI bekerja sama dengan IDN (*Indonesia Diaspora Network*). Hal ini karena IDN mempunyai banyak mitra kerja seperti: ADI (Asosiasi Dosen Indonesia), IKUBI (Ikatan UKM Bisnis Indonesia), Kemeterian Luar Negeri Indonesia, dan JAPFA (perusahaan agri-food yang bermarkas di Singapura). Banyaknya mitra kerja itu tentu akan memotivasi para diaspora untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu.
 7. Hendaknya KPU menyiapkan *internet voting system* yang bisa diakses melalui *smartphone*. Berdasarkan cara tersebut maka diaspora bisa memindai wajah mereka sendiri kemudian dicocokkan dengan database yang bersumber

pada database *e-paspor* (Muliawan, 2016). Metode ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi para diaspora dalam Pemilu 2019.

Daftar Pustaka

- Asmardika, R. (2018). Menlu Retno serahkan data pemilih potensial luar negeri ke KPU. *Okezone.com*. 14 Februari. Retrieved on May 18, 2018 from: <https://news.okezone.com/read/2018/02/14/18/1859613/menlu-retno-serahkan-data-pemilih-potensial-luar-negeri-ke-kpu>
- Bennet, W.L. (2012). The personalization of politics: Political identity, social media, and changing patterns of participation. *ANNALS, AAPSS*, 644, November, 20-39.
- Damanuri, A. (2012). Muslim diaspora dalam isu identitas, gender dan terorisme. *Islamica*. 6(2), Maret, 232-251.
- Eman, M.G. (2017-2019). *Ucapan selamat datang*. Retrieved on Nov. 25, 2018 from: <http://www.diasporaindonesia.org/>
- Faturochman. (2002). Nasib migran dan dominasi konsep-konsep migrasi internasional. Dalam Tukiran, dkk. (Eds.) *Mobilitas penduduk, tinjauan lintas disiplin*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 23-34.
- Felfe, J. & Schyns, B. (2010) Followers' personality and the perception of transformational leadership: Further evidence for the similarity hypothesis. *British Journal of Management.*, 21 (2). pp. 393-410.
- Indoconnect (2014). Diaspora memilih tingkatkan partisipasi pemilu di luar negeri. *IndoConnect.com*, May 2. Retrieved on November 14, 2018 from: <http://indoconnectsingapore.com/diaspora-memilih-tingkatkan-partisipasi-pemilu>

- di-luar-negeri/
Jazuli, A. (2017). Diaspora Indonesia dan dwi kewarganegaraan dalam perspektif undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia. *JIKH*. 11(1), Maret, 97-108.
- Juliswara, V. (2017). Mengembangkan model literasi media yang berkebinnekaan dalam menganalisis informasi berita palsu (hoax) di media sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. 4(2), Agustus, 142-164.
- Kemendag (2017). Mendorong peranan diaspora dalam promosi produk Indonesia. Leaflet. Retrieved on Nov. 23, 2018 from: http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Leaflet-Mendorong_Peranan_Diaspora_dalam_Promosi_Produk_Indonesia.pdf
- Lee, E.S. (1966). A theory of migration. *Demography*. 3(1), 47-57.
- Muliawan, I. W. (2016). Internet system untuk diaspora Indonesia. *Jurnal Ilmiah Informatika dan Komputer*. 21(2), Agustus, 94-101.
- Primandari, T. (2014). Pemilu luar negeri terganjal tiga hal. *Tempo.co*. 24 April. Retrieved on Nov. 24, 2018 from: <https://pemilu.tempo.co/read/572787/pemilu-luar-negeri-terganjal-tiga-hal>
- Romdiati, H. (2015). Globalisasi migrasi dan peran diaspora: Suatu kajian pustaka. *Jurnal Kependudukan Indonesia*. 10(2), Desember, 89-100.
- Setiawan, E. (2012-2018). Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Retrieved on Nov. 2, 2018 from: <https://kbbi.web.id/diaspora>
- Suara Merdeka News (2017). Dapil luar negeri kemungkinan akan dibuat Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu. *Suaramerdeka.com*. June 5. Retrieved on May 23, 2018 from: <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/8123/dapil-luar-negeri-kemungkinan-akan-dibuat-pansus-ruu-penyelenggaraan-pemilu>
- Tim Pokja Geopolitik dan Wawasan Nusantara (2018). *Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Wahlbeck, O. (2002). The concept of diaspora as an analytical tool in the study of refugee communities. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. 28(2), April, 221-238.
- Wibisono, M., Legionosuko, T. & Yuninda, E. (2017). Peran diaspora Indonesia dalam sistem pertahanan negara (Studi kasus diaspora Indonesia di Belgia). *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*. 3(3), Desember, 61-82.